



Hal 9 ■ **konsultasi ke mendagri**

juga akan berkonsultasi ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri)," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/12).

Konsultasi ke Mendagri Tito Karnavian, ungkap Suriansyah, akan dilaksanakan Selasa (3/12), untuk mengetahui apa saja sebenarnya yang dikelompokkan sebagai pekerjaan yang terkait Tupoksi atau di luar Tupoksi.

Adapun perjalanan dinas Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang menjadi catatan BPK-RI, jelas Suriansyah seperti menghadiri peresmian rumah ibadah.

"Karena tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan dewan, karena tidak terkait fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi," jelas Suriansyah.

Contoh lainnya seperti menghadiri musyawarah nasional (Munas) atau musyawarah daerah (Musda) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tertentu.

"Itu dinilai sebagai ranahnya organisasi yang bersangkutan," katanya.

Kemudian, tambah dia, menyaksikan pertandingan olahraga. "Itu juga tidak berkaitan dengan Tupoksi dewan, karena sifatnya hanya menyaksikan saja, bukan pada tiga fungsi dewan tersebut," jelas Suriansyah.

Menurut Legislator Kalbar dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, ihwal perjalanan dinas Anggota DPRD Provinsi Kalbar ini harus ditertibkan.

Penertiban ini, kata Suriansyah, untuk menghindari salah persepsi yang menyebabkan miskomunikasi dengan Sekretaris DPRD (Sekwan).

"Nanti Sekwan menertibkan hal tersebut, malah seolah-olah tidak bisa diterima anggota dewan," tutur Suriansyah.

Padahal, lanjut Suriansyah, Sekwan hanya memberikan masukan terkait apa-apa saja yang boleh atau tidak, layak atau tidak terkait perjalanan dinas DPRD Provinsi Kalbar.

"Supaya ke depan, pengelolaan anggaran termasuk anggaran perjalanan dinas bisa tertib sesuai peraturan perundang-undangan," terang Suriansyah. **(jee)**